

# Landasan Pendidikan Sekolah Dasar

Prof. Dr. Udin S. Winataputra, M.A.



## PENDAHULUAN

---

Pendidikan di Sekolah Dasar (SD) secara sistemik merupakan bagian dari **jenjang pendidikan dasar**. Untuk diingat kembali bahwa jenjang pendidikan dasar mencakup Pendidikan Anak Usia Dini Formal (PAUD Formal), Taman Kanak-kanak atau TK dan pendidikan di Sekolah Dasar (SD), serta Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dilihat dari kedudukan dan perannya, SD merupakan jenis pendidikan umum yang sangat strategis, karena merupakan pendidikan formal paling awal yang memberi landasan bagi pendidikan selanjutnya, yakni pendidikan di SMP. Mulai dari Sekolah Dasar inilah proses pencerdasan anak bangsa secara formal dimulai. Memang, ada sebagian dari siswa SD yang menempuh pendidikan Taman Kanak-kanak. Namun demikian Sekolah Dasar dapat kita pakai sebagai satuan pendidikan pertama yang mewadahi proses pendidikan formal bagi pada umumnya anak Indonesia.

Secara konstitusional, seperti tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas dinyatakan bahwa salah satu tujuan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih lanjut dalam Amandemen UUD 1945 khususnya pada Bab XII Pasal 28A ayat (1) disebutkan bahwa *setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*. Selanjutnya Pasal 31 ayat (2) menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya. Penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar ini merupakan bagian dari kebijakan pendidikan di Indonesia dalam mewujudkan pendidikan untuk semua sesuai dengan prinsip *education for all*.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003) menggariskan pentingnya Wajib Belajar sebagai program pendidikan yang wajib diikuti setiap warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan itu diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan dasar seluas-luasnya kepada anak usia 7 sampai dengan 15 tahun sampai lulus tanpa membedakan latar belakang agama, suku, sosial, budaya, dan ekonomi. Setiap warga negara yang berusia lebih dari 15 (lima belas) tahun yang belum lulus program wajib belajar dapat menyelesaikan pendidikannya di luar tanggungan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Karena setiap warga negara usia wajib belajar berhak mendapatkan pelayanan wajib belajar yang bermutu, maka orang tua anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan kesempatan kepada anaknya untuk mendapatkan pendidikan dasar.

**Modul** ini merupakan bagian dari mata kuliah *Perspektif Pendidikan Sekolah Dasar (PDGK4101)* dalam Program Sarjana (S1) Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), yang secara khusus membahas *Landasan Pendidikan Sekolah Dasar*. Secara konseptual modul ini dirancang untuk memfasilitasi mahasiswa agar mampu menganalisis karakteristik konseptual dan operasional hal-hal yang melandasi pendidikan Sekolah Dasar. Secara psikologis-pedagogis setelah mempelajari modul ini Anda diharapkan mampu menjelaskan landasan konseptual secara komprehensif pendidikan Sekolah Dasar. Secara khusus setelah mempelajari modul ini Anda diharapkan mampu:

1. Menjelaskan landasan filosofis, psikologis-pedagogis, dan sosiologis-antropologis pendidikan Sekolah Dasar.
2. Menjelaskan landasan historis, ideologis, dan yuridis pendidikan Sekolah Dasar.

Untuk memfasilitasi Anda dalam upaya mencapai tujuan khusus tersebut, dalam modul ini kita akan membahas:

1. Landasan filosofis, psikologis-pedagogis, dan sosiologis-antropologis pendidikan Sekolah Dasar.
2. Landasan historis, ideologis, dan yuridis pendidikan Sekolah Dasar.

Dalam mempelajari modul ini Anda akan diajak untuk menjelajahi berbagai sisi dari pemikiran pakar-pakar terkait tentang sistem pendidikan nasional. Secara proporsional penjelajahan terhadap pemikiran tersebut akan mencakup pembahasan tentang: *Apa yang menjadi landasan pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)?* Selanjutnya Anda diminta untuk mengkaji secara kritis dan kreatif implikasi operasional dari konsep dan prinsip serta instrumentasi pendidikan nasional terhadap penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar. Untuk itu Anda diharapkan mengikuti petunjuk belajar sebagai berikut.

1. **Bacalah** bagian **Uraian dan Contoh** dari setiap Kegiatan Belajar dengan cermat sampai Anda dapat menangkap makna dari berbagai sisi dari sistem pendidikan nasional yang diterapkan pada satuan pendidikan SD/MI.
2. **Kerjakan Latihan** dengan baik dan penuh kesungguhan sampai Anda memperoleh pengertian yang lebih utuh tentang penyelenggaraan satuan pendidikan SD/MI. Sekedar untuk memandu Anda dalam mengecek ketepatan latihan, disediakan rambu-rambu jawaban latihan yang dapat Anda gunakan sebagai pendapat pembanding. Di dalam latihan ini Anda akan diminta untuk melakukan berbagai pilihan kegiatan seperti refleksi atau renungan sendiri atau berdialog dengan mahasiswa lain, atau bertanya kepada tutor, atau mengakses informasi ke berbagai sumber belajar tercetak atau elektronik. Dengan cara itu pemahaman Anda tentang teori belajar tersebut akan lebih halus dan lebih luas.
3. **Bacalah Rangkuman** yang disediakan untuk memberikan ringkasan tentang aspek-aspek esensial dari setiap Kegiatan Belajar. Namun Anda juga diminta untuk membuat rangkuman menurut Anda merupakan inti dari kegiatan belajar tersebut.
4. **Kerjakan Tes Formatif** yang disediakan untuk mengecek seberapa jauh Anda mencapai tujuan pembelajaran setiap kegiatan belajar tanpa melihat rambu-rambu jawaban yang disediakan.
5. Bila Anda merasa telah menjawab Tes Formatif dengan baik, bandingkanlah jawaban Anda tersebut dengan **rambu-rambu jawaban** yang disediakan. Bila setelah dihitung ternyata Anda telah mencapai tingkat penguasaan sama atau lebih besar dari **80%**, Anda dipersilakan untuk meneruskan ke kegiatan belajar berikutnya.

## KEGIATAN BELAJAR 1

## Landasan Filosofis, Psikologis-Pedagogis, dan Sosiologis-Antropologis Pendidikan Sekolah Dasar

### A. LANDASAN FILOSOFIS, DAN PSIKOLOGIS-PEDAGOGIS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Pada bagian ini kita akan membahas pendidikan Sekolah Dasar dari sudut pandang filosofis, psikologis-pedagogis, dan sosiologis-antropologis. Yang dimaksud dengan pandangan filosofis adalah cara melihat pendidikan dasar dari hakikat pendidikan dalam kehidupan manusia. Pertanyaan filosofis yang akan kita bahas adalah untuk apa pendidikan Sekolah Dasar dikembangkan. Sementara itu cara pandang psikologis-pedagogis atau psiko-pedagogis adalah cara melihat pendidikan dasar dari fungsi proses pendidikan dasar dalam pengembangan potensi individu sesuai dengan karakteristik psikologis peserta didik. Pertanyaan psiko-pedagogis yang relevan dengan fungsi proses itu adalah bagaimana pendidikan dasar dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didiknya? Sedangkan cara pandang sosiologis-antropologis atau sosio-antropologis adalah cara melihat pendidikan dasar dari fungsi proses pendidikan dasar dalam sosialisasi atau pendewasaan peserta didik dalam konteks kehidupan bermasyarakat, dan proses enkulturasi atau pewarisan nilai dari generasi tua kepada peserta didik yang sedang mendewasa dalam konteks kebudayaan. Pertanyaan pokok dalam kedua proses tersebut adalah bagaimana pendidikan dasar meletakkan dasar dan mengembangkan secara kontekstual sikap sosial dan nilai-nilai kebudayaan untuk kepentingan peserta didik dalam hidup bermasyarakat dan berkebudayaan? Namun demikian dalam pembahasannya kita akan melihat pendidikan dasar itu secara utuh, tidak secara ketat memisah-misahkan cara pandang itu.

Mengapa Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)? Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) merupakan salah satu bentuk pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dalam jalur pendidikan formal di Indonesia pada saat ini. Bentuk pendidikan ini secara operasional dilaksanakan sebagai satuan pendidikan masing-masing sekolah, misalnya SD Negeri Ciputat, SD

Muhammadiyah Yogyakarta, dan SD Xaverius Bandar Lampung, serta Madrasah Ibtidaiyah Banda Aceh. Bentuk pendidikan ini disediakan untuk menampung Anak Usia Sekolah 6 (enam) sampai 13 (tiga belas) tahun. Mengapa Indonesia memilih pengorganisasian pendidikan seperti itu? Untuk itu marilah kita lihat dari dua sudut pandang: pandangan filosofis dan psikologis-pedagogis, dan pandangan ideologis dan yuridis.

## 1. Landasan Filosofis dan Psikologis-pedagogis

**Pandangan filosofis dan psikologis-pedagogis** mewakili cara pandang pakar dalam bidang **filsafat, psikologi, dan pedagogik/ilmu mendidik** terhadap **keniscayaan** proses pendidikan untuk usia sekolah 6-13 tahun. Dikatakan suatu **keniscayaan** karena pendidikan untuk anak usia tersebut **berlaku universal dan telah menjadi kenyataan** atau sering disebut juga sebagai *conditio sine quanon*. Contohnya, di semua Negara di dunia dikenal adanya *primary education* atau *elementary education* seperti SD/MI di Indonesia. Kita semua pasti pernah menempuh pendidikan SD/MI sebelum melanjutkan sekolah ke SLTP/SMP/MTs, bukan?

Ada beberapa argumen tentang keniscayaan pendidikan untuk usia itu. *Pertama*, pelembagaan proses pendidikan untuk usia dalam sistem pendidikan persekolahan atau *schooling system*, diyakini **sangat strategis, artinya sangat tepat dilakukan**, untuk mempengaruhi, mengondisikan, dan mengarahkan perkembangan mental, fisik, dan sosial anak dalam mencapai kedewasaannya secara sistematis dan sistemik. *Kedua*, proses pendewasaan yang sistematis dan sistemik itu diyakini **lebih efektif dan bermakna, artinya lebih memberikan hasil yang baik dan menguntungkan**, daripada proses pendewasaan yang dilepas secara alami dan kontekstual melalui proses **sosialisasi** atau pergaulan dalam keluarga dan masyarakat dan **enkulturasi** atau pembudayaan interaktif dalam kehidupan budaya semata-mata. *Ketiga*, berbagai teori psikologi khususnya teori belajar yang menjadi landasan konseptual teori pembelajaran, seperti teori behaviorisme, kognitifisme, humanisme; dan sosial (Bell-Gredler:1986), filsafat pendidikan seperti **perennialisme**, yang menekankan pentingnya pewarisan kebudayaan, **esensialisme**, yang menekankan pada transformasi nilai esensial, **progresifisme**, yang menekankan pada pengembangan potensi individu, dan **rekonstruksionalisme sosial**, yang menekankan pengembangan individu untuk perubahan masyarakat (Brameld, 1965) sangat mendukung proses pendewasaan anak melalui pendidikan persekolahan. Tentu saja tanpa

mengesampingkan teori *socio-historical* dari Vigotsky, (Moll: 1990) dan teori *experiential learning* (Kolb: 1986), yang menekankan pada proses belajar melalui interaksi sosial-kultural dan belajar melalui pengalaman.

Terkait pada berbagai pandangan pakar tersebut di atas, marilah kita bahas secara singkat **teori Kognitifisme, teori Historis-Kultural, dan teori Humanistik**. Ketiga teori ini sangat relevan untuk menggali landasan filosofis dan psikologis-pedagogis pendidikan di SD/MI. Dengan memahami ketiga teori tersebut sekurang-kurangnya Anda akan memahami **keniscayaan pendidikan SD/MI dilihat dari hakikat anak sebagai individu, makhluk sosial, dan anggota masyarakat**. Teori lainnya dianjurkan untuk Anda pelajari sebagai pengayaan terhadap ketiga teori tersebut, sebagai **Latihan** untuk kasus tersebut. Untuk itu Anda bisa datang ke Perpustakaan PTN Pembina, Perpustakaan Wilayah, atau bila mungkin Anda coba membahasnya dalam kelompok belajar Anda.

#### a. *Teori Kognitifisme*

Teori Kognitifisme, yang lebih dikenal sebagai **teori perkembangan kognitif** dikembangkan oleh Jean Piaget, dan diakui sebagai salah satu pilar atau tonggak konseptual dan sumber pengetahuan tentang perkembangan kognitif anak (Maier,1978: 12). Piaget menegaskan bahwa pengetahuan bukanlah duplikat dari objek, dan bukan pula sebagai tampilan kesadaran dari bentuk yang ada dengan sendirinya dalam diri individu. Pengetahuan sesungguhnya merupakan konstruksi pikiran yang terbentuk, karena secara biologis adanya interaksi antara organisme dengan lingkungan, dan secara kognitif adanya interaksi antara pikiran dengan objek. (Bell-Gredler, 1986: 191). *Contohnya*, konsep rumah, mobil, gunung yang ada di benak kita bukanlah copy dari rumah, mobil, gunung yang sesungguhnya tetapi merupakan konstruksi mental kita tentang rumah, mobil, dan gunung, sebagai hasil interaksi pikiran kita dengan rumah, mobil, dan gunung atau tiruannya, sebagai objek penginderaan kita secara langsung. Karena itu *pengetahuan merupakan suatu proses, bukanlah benda* karena terbentuk melalui interaksi sinambung antara individu dengan lingkungan. (Bell-Gredler,1986:194). *Contohnya*, kemampuan kita untuk memecahkan masalah penghijauan, adalah kemampuan pikiran kita untuk menaksir waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kayu yang cukup tua, dengan kecepatan penebangan kayu yang ada. Untuk itu perlu mengatur siklus penebangan kayu dengan penanaman kembali bibit kayu sebagai penggantinya. Konsep inilah yang kemudian

menjadi salah satu postulat dari filsafat konstruktivisme. Sebagai **Latihan**, Cobalah Anda cari contoh lain mengenai konsep yang ada dalam pikiran Anda dan kaitannya dengan kenyataan yang dapat Anda lihat atau alami sendiri di lingkungan sekitar Anda.

Secara teoritik perkembangan kognitif (Bell-Gredler, 1986:195–196) mencakup tiga proses mental yakni *assimilation*, *accomodation*, dan *equilibration*. Yang dimaksud dengan *assimilation* atau asimilasi adalah integrasi data baru dengan struktur kognitif yang sudah ada dalam pikiran. *Contohnya*, ketika kita melihat benda asing berupa pesawat terbang, proses mental yang terjadi adalah mencari apakah konsep benda asing itu ada dalam pikiran kita dengan bertanya “ini benda apa ya?” Sementara itu *accomodation* atau akomodasi menunjuk pada proses penyesuaian struktur kognitif dengan situasi baru. *Contohnya*, bila ternyata konsep benda asing itu belum ada dalam pikiran kita, kemudian kita mencoba mencari tahu apa sesungguhnya pesawat terbang. Dengan menggunakan konsep lain yang sudah ada di dalam pikiran kita, misalnya *layang-layang*, dan lain-lain kemudian kita mencoba membangun pengertian baru tentang konsep pesawat terbang. Dengan begitu kita mendapatkan pengetahuan baru tentang konsep pesawat terbang. Sedangkan *equilibration* atau ekuilibrasi adalah proses penyesuaian yang sinambung antara asimilasi dan akomodasi. *Contohnya*, jika suatu waktu ada benda asing lain yang pada dasarnya mirip dengan pesawat terbang dalam pikiran kita akan terjadi proses adaptasi untuk memahami benda asing itu sampai kita mendapatkan pengertian yang utuh dan pada akhirnya kita mengerti konsep *pesawat terbang* secara umum. Sebagai **Latihan**, cobalah Anda cari contoh lainnya mengenai proses mental atau proses kognitif berkenaan dengan suatu konsep yang ada dalam pikiran Anda berkaitan dengan kenyataan yang dapat Anda lihat atau alami.

Bertolak dari penelitiannya yang dilakukan secara intensif, Piaget menerangkan adanya empat tahap perkembangan kognitif seperti digambarkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1.1  
Tahap Perkembangan Kognitif Menurut Jean Piaget

| USIA                | TAHAP           | KARAKTERISTIK  |
|---------------------|-----------------|--|
| 0 sampai 1,5-2 th   | Sensorimotorik  | Prasimbolik dan Praverbal; kecerdasan mencakup perkembangan pola tindak; mampu membedakan dirinya dengan lingkungan; mampu membedakan ciri fisiknya; dan mulai tumbuhnya konsep tetap mengenai suatu objek.  |
| 2-3 sampai 7-8 th   | Praoperasional  | Pikiran logis parsial mulai tumbuh; konsep ketetapan suatu objek mengarahkan pada identitas kualitas; proses pikiran bertolak dari isyarat perseptual dan anak belum sadar akan pernyataan yang saling bertentangan; perkembangan bahasa dimulai dan bertambah dengan cepat; bicara spontan didominasi oleh monolog. |
| 7-8 sampai 12-14 th | Operasi Konkret | Perilaku impulsif mulai diganti dengan refleksi dasar dan anak mulai dapat membedakan perbedaan pandangan orang lain; mulai bermain bersama termasuk kesepakatan aturan dan kerja sama; cara berpikir logis terkait dengan objek.  |
| Lebih dari 14 th    | Operasi Formal  | Pikiran tentang rencana hidup dan peran orang dewasa mulai tumbuh; kemampuan berpikir logis dalam berbagai situasi mulai tumbuh; individu mampu bernalar dari situasi hipotetis sampai konkret.  |

**Tahap sensori motorik** merupakan saat mulai berkembangnya operasi **prasimbolik dan praverbal**. Pada tahap ini berkembang pola tindak, **misalnya** anak mulai mampu membedakan dirinya dengan lingkungan; mampu membedakan ciri fisiknya; dan mulai tumbuhnya konsep tetap mengenai suatu objek. **Tahap praoperasional** ditandai dengan perkembangan pikiran logis parsial mulai tumbuh konsep ketetapan suatu objek dengan penekanan pada identitas kualitas. Proses pikiran bertolak dari isyarat perseptual di mana anak belum sadar akan pernyataan yang saling bertentangan. Pada tahap ini perkembangan bahasa dimulai dan bertambah

dengan cepat. *Contohnya*, anak mulai dapat berbicara spontan yang didominasi oleh monolog yakni anak bercerita sendiri. Dalam **tahap operasi konkret** terjadi pergantian perilaku impulsif dengan refleksi dasar. Anak mulai dapat membedakan pandangan dirinya dan orang lain. *Contohnya*, anak mulai bermain bersama dan membuat kesepakatan aturan dan kerja sama antar mereka. Cara berpikir logis yang terkait dengan objek mulai berkembang. Pada **tahap operasi formal** mulai tumbuh pikiran tentang rencana hidup dan peran orang dewasa, kemampuan berpikir logis dalam berbagai situasi dan mulai mampu bernalar secara utuh mulai dari situasi konkret sampai situasi hipotetis.

Dengan menggunakan teori Piaget tersebut, kita dapat melihat bahwa anak usia SD/MI berada dalam tahap perkembangan kognitif **Praoperasional sampai Konkret**. Pada usia ini anak memerlukan bimbingan sistematis dan sistemik guna membangun pengetahuannya. **Oleh karena itu, peran pendidikan di SD/MI sangatlah strategis bagi pengembangan kecerdasan dan kepribadian anak.**

#### *b. Teori Historis-Kultural (Cultural Historical Theories)*

**Teori ini** dikembangkan oleh Lev S.Vygotsky yang memusatkan perhatian pada bidang telaah aspek manusia dari kognisi (<http://web.syr.edu/~jccatald/cognitive>). Teori ini memusatkan perhatian pada penggunaan simbol sebagai alat, dengan dasar pemikiran bahwa manusia menemukan alat yang telah mengantarkan kemajuan bagi umat manusia. Sistem simbol yang dikembangkan adalah bahasa lisan dan tulisan, sistem matematika, notasi musik dan lainnya. Melalui penggunaan simbol-simbol ini manusia mengembangkan cara berpikir baru. Faktor-faktor biologis seperti kematangan berpengaruh terhadap proses berpikir dasar seperti perhatian, ingatan dan persepsi.

Blanck (1990) dalam Moll (1990;32-43), mengemukakan bahwa Vygotsky, adalah seorang Yahudi Rusia yang lahir tahun 1896 di Orsha, Republik Belrousia dibesarkan oleh ibunya yang mempunyai *gentle personality* atau kepribadian yang lembut. Ia menempuh pendidikan dasar privat secara mandiri di rumah atau *home schooling* dengan bantuan seorang tutor yang pernah diasingkan ke Siberia karena aktivitas politik. Walaupun ia adalah seorang ahli matematik tetapi juga membimbing belajar dalam mata pelajaran lainnya sampai lulus ujian pendidikan dasar. Baru setelah itu Vygotsky melanjutkan ke pendidikan menengah atau *Gymnasium*, dan dua

tahun terakhirnya diselesaikan di Sekolah Swasta unggulan yang bertaraf akademik tinggi. Kehidupan di rumahnya sangat kondusif diwarnai kehidupan belajar dan bermain dengan suasana kehidupan keluarga yang komunikatif satu sama lain. Kehidupan seperti inilah yang dinilai merupakan peran yang menentukan dalam pembentukan anak secara kultural. Pada tahun 1914 Vigosky memasuki dua Universitas sekaligus di Moskwa University dan Shaniavky People's University. Dari kedua universitas itu ia mendapatkan fondasi pengetahuan yang kuat dalam bidang *sejarah, filsafat, psikologi dan sastra*. Pada tahun 1917 ia lulus dari kedua universitas itu, kemudian bekerja sebagai guru di kotanya Gomel. Yang menjadi perhatian Vigotsky adalah *behavior and cognitive process*, **yakni hubungan perilaku dengan proses kognitif**.

Vigotsky (Blanck,1990:44-49) mendasarkan teorinya pada konsep bahwa aktivitas mental adalah sesuatu hal yang unik hanya pada manusia. Hal itu merupakan produk dari belajar sosial atau *social learning*, yakni proses penyadaran simbol-simbol sosial dan internalisasi kebudayaan dan hubungan sosial. Kebudayaan diinternalisasi dalam bentuk sistem neuropsikis yang merupakan bagian dari bentuk aktivitas fisiologis dari otak manusia. Aktivitas mental yang tinggi memungkinkan pembentukan dan perkembangan proses mental manusia yang lebih tinggi. Aktivitas mental yang sangat tinggi dalam diri manusia bukanlah semata-mata sebagai aktivitas syaraf tertinggi tetapi merupakan aktivitas syaraf tertinggi yang telah menginternalisasi makna sosial yang diperoleh dari aktivitas budaya manusia melalui simbol-simbol. Proses ini pada dasarnya bersifat historis yang terjadi sejak masa perkembangan ontogenetik dan berlangsung melalui aktivitas sosial anak dengan orang dewasa yang memungkinkan individu mampu menangkap makna sosial.

Kebudayaan dapat membatasi taraf berpikir anak yang bisa dicapai pada jenis sistem simbol yang dipakai dalam budaya tersebut. Fungsi-fungsi dasar kemudian ditransformasikan ke dalam berpikir yang kompleks dengan formula tesis-antitesis-sintesis. Kata merupakan unit fungsional dasar yang membentuk struktur kesadaran. Hal itu berfungsi dalam dua cara, *Pertama*, ada dua cabang perkembangan kognitif, yakni 1) menguasai sistem simbol, dan 2) mengembangkan bentuk-bentuk kultural penalaran. *Kedua*, adanya hukum perkembangan genetik yang menyatakan bahwa semua fungsi yang kompleks dimulai sebagai interaksi sosial. *Ketiga*, adanya suatu proses di mana ucapan dan simbol pertama-tama dikuasai sebagai bentuk komunikasi

dan kemudian menjadi alat di dalam menstrukturkan dan mengelola berpikir anak. Zona perkembangan proksimal adalah kemampuan yang dipertunjukkan anak melalui interaksi dan fasilitasi orang dewasa sebagai ruang yang sengaja diciptakan. Hal itu merupakan faktor kunci dalam mengembangkan fungsi kognitif yang lebih tinggi. Kunci menuju pengembangan kemampuan potensial adalah permainan anak meniru orang dewasa. *Contohnya*, anak perempuan bermain peran sebagai ibu dengan menggunakan boneka yang diperankan sebagai anak-anakannya, atau anak laki-laki bermain perang-perangan seperti orang dewasa.

Pemerolehan pengetahuan dan perkembangan kognitif seseorang sejalan dengan teori *sociogenesis* yang menempatkan kesadaran sosial sebagai hal yang bersifat primer, sedangkan aspek individualnya bersifat derivatif. (Vigotsky, dalam Budiningsih: 2003). Hal ini mengandung arti bahwa pada dasarnya pengetahuan dan perkembangan kognitif seseorang merujuk pada berbagai sumber yang ada di luar dirinya, walaupun tidaklah berarti bahwa individu bersifat pasif. Itu sebabnya dilihat dari sudut pandang *Vigotskian* (penganut teori Vigotsky) muatan kognitif seseorang berkembang secara *ko-konstruktivistik*, dalam arti ia berkembang secara interaktif antara faktor sosial-kultural dan kapasitas mental individu. *Contohnya*, kemampuan seseorang untuk menceritakan kembali cerita rakyat atau cerita sejarah dengan baik bukan semata-mata karena potensi kognitifnya tetapi juga karena berbagai rangsangan dari luar berupa cerita dalam buku yang dibacanya, tayangan sinetron atau film yang relevan yang dilihatnya serta penguatan lingkungan sekitar termasuk lingkungan di rumah yang memungkinkan terbukanya akses informasi mengenai cerita tersebut.

Teori Vigotsky mengidentifikasi adanya tiga konsep pokok yang terkait erat dengan pembelajaran, yaitu hukum genetik perkembangan atau *genetic law of development*, zona perkembangan proksimal atau *zone of proximal development*, dan mediasi atau *mediation*. Menurut hukum genetik perkembangan (Budiningsih, 2003: 8-9), pertumbuhan dan perkembangan kognitif seseorang berlangsung dalam dua tataran yaitu lingkungan sosial sebagai ranah **intermental atau interpsikologis**, yang dianggap sebagai faktor utama atau primer, dan suasana psikologis dalam diri seseorang sebagai ranah **intramental atau intrapsikologis**, yang tumbuh sebagai implikasi dari proses internalisasi terhadap proses-proses sosial. **Zona perkembangan proximal adalah ruang antara perkembangan aktual, artinya nyata dan perkembangan potensial seseorang, yang ada dalam**

**diri atau late.** Perkembangan aktual dapat dilihat dari kemampuan intramental seseorang dalam bentuk, **contohnya**, melakukan sesuatu, seperti memecahkan masalah, secara mandiri. Perkembangan potensial dapat dilihat dari kemampuan intermental seseorang dalam bentuk menyelesaikan pekerjaan di bawah bimbingan orang lain. Ruang antara kemampuan intramental dengan intermental inilah yang disebut zona perkembangan proximal, yang pada dasarnya melukiskan proses pematangan dari fungsi-fungsi kemampuan seseorang melalui interaksi sosial-kultural dalam lingkungannya. Sedangkan mediasi adalah simbol-simbol, seperti bahasa, lambang dan semiotika yang ada dalam lingkungan yang merupakan produk sosial-kultural yang digunakan oleh individu untuk mengungkapkan kemampuannya.

Tentang mediasi dibedakan dalam dua bentuk yakni **mediasi kognitif** dan **mediasi meta kognitif**. Mediasi kognitif adalah penggunaan struktur kognitif, yang dapat berupa konsep non-ilmiah (pengetahuan spontan) dan konsep ilmiah deklaratif (konsep, generalisasi, teori) dan prosedural (metode ilmiah), dalam memecahkan masalah. Di lain pihak mediasi meta kognitif adalah pemanfaatan instrumen semiotik untuk melakukan pengaturan diri (*self-regulation*) dalam bentuk kegiatan perencanaan-diri (*self-planning*), pemantauan-diri (*self-monitoring*), pengecekan-diri (*self-checking*), dan evaluasi-diri (*self-evaluation*).

Dengan menggunakan teori Vigotsky, proses pendidikan di SD/MI seyogianya diperlakukan sebagai proses pertumbuhan kemampuan dalam diri individu sebagai produk interaksi antara kemampuan intramental dan intermental individu dalam konteks sosial-kultural. Lingkungan sosial-kultural, *contohnya* lingkungan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, merupakan determinan dari pertumbuhan kemampuan itu.

### c. Teori Humanistik.

Konsep humanistik dalam pendidikan memiliki banyak pengertian, antara lain bahwa suatu sekolah atau kelas atau guru dapat dinilai humanistik bila memenuhi berbagai kriteria: menekankan pada potensi manusia sebagai ciri utama; hubungan yang hangat, kepercayaan, penerimaan, kesadaran akan perasaan orang lain, kejujuran antar pribadi, dan pengetahuan kemasyarakatan. Pendidikan humanistik adalah pendidikan manusia secara utuh dan menyeluruh, yang memusatkan perhatian pada proses pendidikan yang memungkinkan peserta didik melakukan belajar menikmati kehidupan

atau mencapai kebutuhan lebih tinggi dalam pengertian kebutuhan akan kehidupan yang optimal atau kemungkinan pertumbuhan yang positif.

Pendekatan humanistik memiliki karakteristik: (a) Menjadikan peserta didik sendiri sebagai isi, yakni mereka sendiri belajar tentang perasaannya dan perilakunya; (b) Mengenal bahwa imajinasi peserta didik seperti dicerminkan dalam seni, impian, cerita, dan fantasi sebagai hal yang penting dalam kehidupan yang dapat dibahas bersama dengan teman sekelasnya; (c) Memberikan perhatian khusus terhadap ekspresi non-verbal seperti isyarat dan nada suara karena diyakini hal itu sebagai ungkapan perasaan dan sikap yang dikomunikasikan; (d) Menggunakan permainan, improvisasi, dan bermain peran sebagai wahana simulasi perilaku yang dapat dikaji dan diubah.

Ada sejumlah prinsip umum hukum ibu jari, yakni (a) Guru janganlah pernah menarik siswa ke dalam pengalaman yang ia sendiri tidak suka; (b) Guru janganlah pernah mendorong peserta didik untuk menyampaikan sesuatu yang ia sendiri sungkan mengemukakannya, melibatkan peserta didik terhadap hal yang ia sendiri tidak mau melibatkan diri, atau mengeksplorasi sesuatu yang ia sendiri tidak mau melakukannya; (c) Guru janganlah pernah memanipulasi peserta didik dengan berpretensi bahwa peserta didik mengerjakan sesuatu pada saat ia sendiri mengerjakan hal lain. Ciri pandangan humanistik adalah dalam melihat kebutuhan sebagai hal yang bukan semata-mata dalam rangka memelihara kehidupan tetapi untuk memenuhi perkembangan secara penuh. Perilaku seseorang terkait pada bagaimana kepercayaannya tentang orang lain. Oleh karena itu, dalam pandangan humanistik intelegensi atau kecerdasan bukanlah sesuatu yang tetap tetapi dapat dibangun.

Dalam konteks itulah, **pendidikan humanistik untuk SD/MI** seyogianya diwujudkan dalam bentuk kurikulum bermuatan humanistik dan struktur sekolah atau kelompok yang humanistik. Kurikulum bermuatan humanistik memusatkan pada isu-isu tentang manusia, *seperti* kebutuhan berteman, perilaku agresif dan lain-lain, yang dirancang untuk membantu peserta didik agar dapat mengelola persolan di dalam kehidupannya, juga termasuk proses kurikulum yang memanusiakan. Pendidikan humanistik secara lebih mendalam mencakup: pilihan atau pengendalian oleh peserta didik, kepedulian yang dirasakan, keterampilan hidup, evaluasi diri, dan peran guru sebagai fasilitator. Dalam pendidikan humanistik peserta didik belajar untuk bekerja secara efektif dengan cara melakukan pilihan dan

pengendalian mengenai pendidikannya termasuk tujuan pendidikan dan kegiatan hariannya. Oleh karena itu, peran pendidik berubah dari sebagai pengarah belajar menjadi pemberi kemudahan belajar dan kelas menjadi laboratorium belajar peserta didik.

Ada tujuh aspek tujuan pendidikan humanistik yakni: (a) Perkembangan personal, *contohnya* kematangan berbicara (b) Perilaku kreatif yang mencakup pengembangan kemurnian, kreativitas imajinasi, interpretasi baru, makna baru dan sejenisnya, *seperti* bermain untuk membuat berbagai bentuk dari tanah liat; (c) Kesadaran antar pribadi, *contohnya* setiap orang pasti membutuhkan orang lain untuk berteman (d) Orientasi terhadap mata pelajaran atau disiplin ilmu (e) Materi, *seperti* pengetahuan sosial, matematika, dan lain-lain (f) Metode pembelajaran afektif, *contohnya* bermain peran sosial; (g) Guru dan tenaga kependidikan lainnya. Proses kreatif adalah penampilan dalam tindakan, yang merupakan suatu kekhasan individual di satu pihak dan barang-barang, peristiwa, manusia, atau keadaan kehidupannya di lain pihak. Embrio dari kreativitas adalah *man's tendency to actualize himself, to become his potentialities*, yakni kecenderungan manusia untuk mengaktualisasikan dirinya menjadi perwujudan potensinya yang ia bisa jadi. Dengan mengombinasikan pandangannya Ericson tentang *Affective Development*, diperoleh tahap perkembangan manusia yang sehat sebagai berikut (a) Tahap bertahan hidup pada masa bayi sebagai tahap awal memasuki kehidupan; (b) Tahap pengokohan pada masa kanak-kanak sebagai masa yang ditandai dengan proses belajar tentang aturan perilaku yang berlaku dalam keluarga dan masyarakat; (c) Tahap sosiabilitas pada masa remaja sebagai masa yang mencakup usia Sekolah Menengah Pertama sebagai masa memasuki dunia yang menuntut perkembangan konseptual, emosional dan sosial dan ditemukannya dunia konvensi dan kontrak sosial serta kesepakatan timbal balik; (d) Tahap keahlian pada masa dewasa muda yang mencakup masa akhir sekolah menengah pertama sampai masa pendidikan tinggi yang menuntut individu untuk memilih dan memulai bekerja secara cermat untuk menyongsong dunia kerja profesional; dan (e) Tahap kematangan pada masa dewasa yang ditandai dengan kebutuhan memenuhi keinginan untuk menjadi sesuatu sebagai bentuk aktualisasi diri.

**Masa pendidikan di SD/MI adalah masa berkembangnya Tahap Pengokohan sampai dengan Tahap Sosiabilitas.** Sebagai **Latihan**, tuliskan dari pengalaman Anda sebagai Guru SD/MI beberapa contoh masalah yang berkaitan dengan penanganan perilaku peserta didik. *Contohnya* peserta didik

yang senang menyendiri, atau sebaliknya selalu menjadi bintang di tengah teman-temannya, atau yang sukar bergaul atau pemalu. Kemukakan cara yang pernah Anda tempuh untuk mengatasinya. Cek apakah cara yang Anda lakukan itu sesuai dengan teori psikologi mana?

## **B. LANDASAN SOSIOLOGIS-ANTROPOLOGIS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

Pada bagian ini kita akan membahas pendidikan Sekolah Dasar dari sudut pandang **sosiologis-antropologis**. Cara pandang sosiologis-antropologis atau **sosio-antropologis** adalah cara melihat pendidikan dasar dari **fungsi proses pendidikan dasar dalam proses sosialisasi** atau pendewasaan peserta didik dalam konteks kehidupan bermasyarakat, **dan proses enkulturasi atau pewarisan nilai** dari generasi tua kepada peserta didik yang sedang mendewasa **dalam konteks kebudayaan**. Pertanyaan pokok dalam kedua proses tersebut adalah **bagaimana pendidikan dasar meletakkan dasar dan mengembangkan secara kontekstual sikap sosial dan nilai-nilai kebudayaan untuk kepentingan peserta didik dalam hidup bermasyarakat dan berkebudayaan?** Namun demikian dalam pembahasannya kita akan melihat pendidikan dasar itu secara utuh, tidak secara ketat memisah-misahkan cara pandang itu.

Dilihat secara sosiologis dan antropologis masyarakat dan bangsa Indonesia sangatlah heterogen dalam segala aspeknya. Oleh karena itu, walaupun kita secara konstitusional menganut konsepsi satu sistem pendidikan nasional, instrumentasi atau pengelolaan sistem pendidikan itu tidaklah mungkin dilakukan secara homogen penuh. Masyarakat dan bangsa Indonesia memiliki fenomena yang bersifat **pluralistik** atau **berbhinneka** tetapi terikat oleh komitmen satu kesatuan tanah air, kebangsaan, dan bahasa persatuan. Itulah semangat **Bhinneka Tunggal Ika** yang menjadi seloka kehidupan kita dan semangat **Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928**. Keadaan itu yang merupakan suatu *conditio sine quanon* atau kenyataan yang merupakan keniscayaan yang secara nyata akan mempengaruhi praksis atau kehidupan nyata pendidikan nasional kita, termasuk pendidikan Sekolah Dasar. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional kita menganut prinsip **diversifikasi** dalam pengembangan kurikulumnya, sebagai bentuk perwujudan kelenturan atau fleksibilitas dan adaptabilitas sistem pendidikan terhadap kondisi sosiologis dan antropologis Indonesia. *Contohnya,*

Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) masing-masing Sekolah Dasar di berbagai tempat di seluruh tanah air dapat mengakomodasikan keunikan lingkungannya (perkotaan, perdesaan pertanian, perdesaan pantai dan sebagainya) dengan tetap merujuk pada standar nasional pendidikan.

Secara sosiologis Indonesia merupakan masyarakat agraris dan maritim yang secara terus-menerus mengalami transformasi menjadi masyarakat modern dengan cara memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Secara sosio-politik bangsa Indonesia merupakan sebuah negara kebangsaan atau *nation state* yang didukung oleh masyarakat majemuk multi-etnis, multiras, multi pengalaman sejarah yang bersatu dalam tata kehidupan masyarakat negara, dari sebuah negara kesatuan atau *unitary state* dan bukan sebuah negara serikat atau *federal state*. Hal ini mengandung makna bahwa masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia merupakan sebuah entitas sosial yang menjadi satu kesatuan utuh karena faktor kontrak sosial dan komitmen sosial, sebagaimana hal itu termaktub dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Pembukaan UUD 1945. Inti dari semua kontrak dan komitmen sosial tersebut itu adalah bahwa bangsa Indonesia adalah satu tapi plural yang bersatu dalam wadah NKRI untuk mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, keutuhannya harus selalu dijaga dan dipelihara oleh semua komponen masyarakat, bangsa, dan Negara.

Implikasi dari karakteristik sosiologis dan sosial-politis masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia adalah perlu dibangunnya satu sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan dengan menerapkan politik pendidikan nasional yang terdesentralisasi. Dengan politik desentralisasi pendidikan, kekuasaan pemerintah dalam pengelolaan sistem pendidikan nasional terbagi ke dalam kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pendidikan nasional yang menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas lebih bersifat sentralistik, kini dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas secara fundamental berubah menjadi sebuah sistem pendidikan yang lebih desentralistik. Alasan-alasan perubahan yang sangat mendasar dan pokok-pokok desentralisasi pendidikan tersebut dapat kita pahami dari Penjelasan UU 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas sebagai berikut.

1. Secara makro nasional gerakan reformasi di Indonesia menuntut diterapkannya prinsip-prinsip **demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia** dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Keseluruhan prinsip tersebut memberi implikasi terhadap **kandungan, proses dan manajemen pendidikan nasional**. Untuk itulah dalam sistem pendidikan kita saat ini diupayakan berbagai pembaharuan seperti **kurikulum nasional yang bersifat sentralistik menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersifat desentralistik; penerapan kurikulum yang berdiversifikasi untuk melayani keberagaman; dan pengembangan standar nasional pendidikan sebagai baku mutu pendidikan secara nasional**.
3. Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2006 tentang Pemerintahan daerah beserta PP RI No. 38 Tahun 2007, sebagian besar urusan pendidikan telah didesentralisasikan ke pemerintah kabupaten/kota, sehingga perwujudan sistem pendidikan nasional kini berada pada situs satuan pendidikan dengan paradigma **manajemen berbasis sekolah (MBS) dan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)** sebagai wahana operasional sistem pendidikan nasional tersebut. **Pemerintah pusat** lebih banyak berperan sebagai **regulator dan penjamin mutu** pendidikan secara makro dalam konteks perwujudan pendidikan nasional sebagai wahana pemberdayaan potensi peserta didik, pengembangan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, guna mewujudkan proses pencerdasan kehidupan bangsa.

Dengan demikian bila semua prinsip pendidikan nasional dapat diwujudkan dengan baik, maka keberagaman yang dimiliki oleh masyarakat dan bangsa, Indonesia akan terakomodasi dalam sistem pendidikan nasional. Demikian juga dalam pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar, yang kita paham bahwa sebagian besar wilayah Indonesia merupakan wilayah pedesaan, dan sebagian besar penduduk Indonesia dari sekitar 200 jutaan itu terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dalam konteks itu maka pengelolaan pendidikan yang berdiversifikasi dengan tetap berorientasi mutu yang bersifat nasional atas dasar standar nasional pendidikan, merupakan suatu keharusan untuk dikembangkan secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan demikian pendidikan Sekolah Dasar akan mampu memfungsikan dirinya sebagai lembaga pendidikan formal yang memberi landasan pengembangan diri

sebagai individu putra putri Indonesia dan memberi landasan yang kuat untuk melanjutkan pada pendidikan SMP dan sejenisnya sebagai manifestasi program wajib belajar pendidikan dasar.

Secara antropologis Indonesia merupakan masyarakat multietnis dan multiras. Dari Sabang sampai Merauke dan dari Talaud sampai Kupang di dalam 13.000 pulau itu hidup ratusan etnis/suku yang memiliki tradisi yang unik dan berbicara dalam bahasa daerah setempat, serta keturunan bangsa lain yang karena proses sejarah dan/atau proses yuridis menjadi warga negara Indonesia. Ke semua itu merupakan kenyataan yang perlu terakomodasi dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional, belum lagi ada sebagian kecil masyarakat Indonesia yang karena menempati taraf kehidupan ekonomi yang lebih baik sebagai hasil usahanya atau karena kedudukannya, memerlukan kesempatan pendidikan bagi anak-anaknya yang melampaui standar nasional pendidikan, misalnya dalam bentuk kelas internasional atau sekolah yang bertaraf internasional. Sementara itu keunggulan lokal pun memperoleh peluang untuk dikembangkan. Untuk itulah dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas digariskan ketentuan perlu dikembangkannya pendidikan SD yang berstandar nasional, tetapi juga pendidikan SD dengan orientasi keunggulan lokal atau SD dengan orientasi internasional dalam kurikulumnya. Namun demikian perlu diwaspadai jangan sampai pengembangan sekolah bertaraf internasional itu secara pelan menggerus semangat kebangsaan Indonesia.

Terkait erat dengan keberagaman masyarakat dan bangsa Indonesia, sistem pendidikan nasional menerapkan prinsip pendidikan yang demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif, pendidikan terbuka dan multimakna, pendidikan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan sepanjang hayat, dan pendidikan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat. Kesemua prinsip tersebut merupakan wahana programatik yang memungkinkan sistem pendidikan nasional mampu mengakomodasikan keberagaman sosial dan budaya masyarakat dan bangsa Indonesia.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

Sebagai **Latihan**, cobalah Anda tuliskan kondisi sosial-budaya masyarakat yang ada di sekitar SD tempat Anda bertugas. Tuliskan latar belakang pada umumnya orang tua siswa, apakah petani, pedagang, nelayan atau apa lagi. Berikan komentar apa yang sesungguhnya diperlukan oleh masyarakat sekitar dalam hal pengembangan potensi siswa terkait lingkungan sosial-budaya setempat.



## RANGKUMAN

---

1. Pandangan filosofis adalah cara melihat pendidikan dasar dari hakikat pendidikan dalam kehidupan manusia. Pertanyaan filosofis yang akan kita bahas adalah untuk apa pendidikan Sekolah Dasar dikembangkan.
2. Pandangan psikologis-pedagogis atau psiko-pedagogis adalah cara melihat pendidikan dasar dari fungsi proses pendidikan dasar dalam pengembangan potensi individu sesuai dengan karakteristik psikologis peserta didik. Pertanyaan psiko-pedagogis yang relevan dengan fungsi proses itu adalah bagaimana pendidikan dasar dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didiknya.
3. Pandangan sosiologis-antropologis atau sosio-antropologis adalah cara melihat pendidikan dasar dari fungsi proses pendidikan dasar dalam sosialisasi atau pendewasaan peserta didik dalam konteks kehidupan bermasyarakat, dan proses enkulturasi atau pewarisan nilai dari generasi tua kepada peserta didik yang sedang mendewasa dalam konteks kebudayaan.
4. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) merupakan salah satu bentuk pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dalam jalur pendidikan formal di Indonesia pada saat ini. Bentuk pendidikan ini secara operasional dilaksanakan sebagai satuan pendidikan masing-masing sekolah,
5. Ada beberapa argumen tentang keniscayaan pendidikan untuk usia itu. *Pertama*, pelembagaan proses pendidikan untuk usia dalam sistem pendidikan persekolahan atau *schooling system*, diyakini

sangat strategis, artinya sangat tepat dilakukan, untuk mempengaruhi, mengondisikan, dan mengarahkan perkembangan mental, fisik, dan sosial anak dalam mencapai kedewasaannya secara sistematis dan sistemik. *Kedua*, proses pendewasaan yang sistematis dan sistemik itu diyakini lebih efektif dan bermakna, artinya lebih memberikan hasil yang baik dan menguntungkan, daripada proses pendewasaan yang dilepas secara alami dan kontekstual melalui proses sosialisasi atau pergaulan dalam keluarga dan masyarakat dan enkulturasi atau pembudayaan interaktif dalam kehidupan budaya semata-mata. *Ketiga*, berbagai teori psikologi khususnya teori belajar yang menjadi landasan konseptual teori pembelajaran, seperti teori behaviorisme, kognitifisme, humanisme; dan sosial.

6. Filsafat pendidikan seperti perenialisme, yang menekankan pentingnya pewarisan kebudayaan, esensialisme, yang menekankan pada transformasi nilai esensial, progresifisme, yang menekankan pada pengembangan potensi individu, dan rekonstruksionalisme sosial, yang menekankan pengembangan individu untuk perubahan masyarakat sangat mendukung proses pendewasaan anak melalui pendidikan persekolahan. Tentu saja tanpa mengesampingkan teori *socio-historical* dan teori *experiential learning* yang menekankan pada proses belajar melalui interaksi sosial-kultural dan belajar melalui pengalaman.
7. Piaget menegaskan bahwa pengetahuan bukanlah duplikat dari objek, dan bukan pula sebagai tampilan kesadaran dari bentuk yang ada dengan sendirinya dalam diri individu. Pengetahuan sesungguhnya merupakan konstruksi pikiran yang terbentuk, karena secara biologis adanya interaksi antara organisme dengan lingkungan, dan secara kognitif adanya interaksi antara pikiran dengan objek.
8. Secara teoritik perkembangan kognitif mencakup tiga proses mental yakni *assimilation*, *accomodation*, dan *equilibration*. Yang dimaksud dengan *assimilation* atau asimilasi adalah integrasi data baru dengan struktur kognitif yang sudah ada dalam pikiran. *Contohnya*, ketika kita melihat benda asing berupa pesawat terbang, proses mental yang terjadi adalah mencari apakah konsep benda asing itu ada dalam pikiran kita dengan bertanya “ini benda apa ya?”. Sementara itu *accomodation* atau akomodasi menunjuk pada proses penyesuaian struktur kognitif dengan situasi baru. *Contohnya*, bila ternyata konsep benda asing itu belum ada dalam pikiran kita, kemudian kita mencoba mencari tahu apa sesungguhnya pesawat terbang. Dengan menggunakan konsep lain

yang sudah ada di dalam pikiran kita, misalnya *layang-layang*, dan lain-lain kemudian kita mencoba membangun pengertian baru tentang konsep pesawat terbang. Dengan begitu kita mendapatkan pengetahuan baru tentang konsep pesawat terbang. Sedangkan *equilibration* atau ekuilibrasi adalah proses penyesuaian yang sinambung antara asimilasi dan akomodasi. *Contohnya*, jika suatu waktu ada benda asing lain yang pada dasarnya mirip dengan pesawat terbang dalam pikiran kita akan terjadi proses adaptasi untuk memahami benda asing itu sampai kita mendapatkan pengertian yang utuh dan pada akhirnya kita mengerti konsep *pesawat terbang* secara umum.

9. Anak usia SD/MI berada dalam tahap perkembangan kognitif Praoperasional sampai Konkret. Pada usia ini anak memerlukan bimbingan sistematis dan sistemik guna membangun pengetahuannya. Oleh karena itu, peran pendidikan di SD/MI sangatlah strategis bagi pengembangan kecerdasan dan kepribadian anak.
10. Secara sosial-kultural aktivitas mental merupakan sesuatu hal yang unik hanya pada manusia. Hal itu merupakan produk dari belajar sosial atau *social learning*, yakni proses penyadaran simbol-simbol sosial dan internalisasi kebudayaan dan hubungan sosial. Kebudayaan diinternalisasi dalam bentuk sistem neuropsikis yang merupakan bagian dari bentuk aktivitas fisiologis dari otak manusia. Aktivitas mental yang tinggi memungkinkan pembentukan dan perkembangan proses mental manusia yang lebih tinggi.
11. Aktivitas mental yang sangat tinggi dalam diri manusia bukanlah semata-mata sebagai aktivitas syaraf tertinggi tetapi merupakan aktivitas syaraf tertinggi yang telah menginternalisasi makna sosial yang diperoleh dari aktivitas budaya manusia melalui simbol-simbol. Proses ini pada dasarnya bersifat historis yang terjadi sejak masa perkembangan ontogenetik dan berlangsung melalui aktivitas sosial anak dengan orang dewasa yang memungkinkan individu mampu menangkap makna sosial.
12. Dengan menggunakan teori sosial kultural, proses pendidikan di SD/MI seyogianya diperlakukan sebagai proses pertumbuhan kemampuan dalam diri individu sebagai produk interaksi antara kemampuan intramental dan intermental individu dalam konteks sosial-kultural, lingkungan sosial-kultural.
13. Pendekatan humanistik memiliki karakteristik: (a) Menjadikan peserta didik sendiri sebagai isi, yakni mereka sendiri belajar tentang perasaannya dan perilakunya; (b) Mengenal bahwa imajinasi peserta didik seperti dicerminkan dalam seni, impian, cerita, dan fantasi sebagai hal yang penting dalam kehidupan yang dapat

- dibahas bersama dengan teman sekelasnya; (c) Memberikan perhatian khusus terhadap ekspresi non-verbal seperti isyarat dan nada suara karena diyakini hal itu sebagai ungkapan perasaan dan sikap yang dikomunikasikan; (d) Menggunakan permainan, improvisasi, dan bermain peran sebagai wahana simulasi perilaku yang dapat dikaji dan diubah.
14. Cara pandang sosiologis-antropologis atau sosio-antropologis adalah cara melihat pendidikan dasar dari fungsi proses pendidikan dasar dalam proses sosialisasi atau pendewasaan peserta didik dalam konteks kehidupan bermasyarakat, dan proses enkulturasi atau pewarisan nilai dari generasi tua kepada peserta didik yang sedang mendewasa dalam konteks kebudayaan. Pertanyaan pokok dalam kedua proses tersebut adalah bagaimana pendidikan dasar meletakkan dasar dan mengembangkan secara kontekstual sikap sosial dan nilai-nilai kebudayaan untuk kepentingan peserta didik dalam hidup bermasyarakat dan berkebudayaan.
  15. Dilihat secara sosiologis dan antropologis masyarakat dan bangsa Indonesia sangatlah heterogen dalam segala aspeknya. Oleh karena itu, walaupun kita secara konstitusional menganut satu sistem pendidikan nasional, instrumentasi atau pengelolaan sistem pendidikan itu tidaklah mungkin dilakukan secara homogen penuh. Masyarakat dan bangsa Indonesia memiliki fenomena yang bersifat pluralistik atau berbhinneka tetapi terikat oleh komitmen satu kesatuan tanah air, kebangsaan, dan bahasa persatuan. akan mempengaruhi praksis atau kehidupan nyata pendidikan nasional kita, termasuk pendidikan Sekolah Dasar.
  16. Keseluruhan prinsip tersebut memberi implikasi terhadap kandungan, proses dan manajemen pendidikan nasional. Untuk itulah dalam sistem pendidikan kita saat ini diupayakan berbagai pembaharuan seperti kurikulum nasional yang bersifat sentralistik menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersifat desentralistik; penerapan kurikulum yang berdiversifikasi untuk melayani keberagaman; dan pengembangan standar nasional pendidikan sebagai baku mutu pendidikan secara nasional.

**TES FORMATIF 1** \_\_\_\_\_

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Pandangan filosofis adalah cara melihat pendidikan dasar dari hakikat pendidikan dalam kehidupan manusia. Pertanyaan filosofis yang akan kita bahas adalah ....
  - A. apa tujuan pendidikan Sekolah Dasar dikembangkan
  - B. kapan pendidikan Sekolah Dasar mulai dikembangkan
  - C. berapa banyak pendidikan Sekolah Dasar perlu dikembangkan
  - D. di mana saja pendidikan Sekolah Dasar perlu dikembangkan
  
- 2) Pandangan psikologis-pedagogis atau psiko-pedagogis adalah cara melihat pendidikan dasar dari fungsi proses pendidikan dasar, dalam pengembangan potensi individu sesuai dengan karakteristik psikologis peserta didik. Pertanyaan psiko-pedagogis yang relevan dengan fungsi proses itu adalah bagaimana pendidikan dasar dikembangkan sesuai dengan ....
  - A. dana yang tersedia
  - B. teori yang menjadi rujukannya
  - C. prioritas pemerintah dan masyarakat.
  - D. karakteristik peserta didiknya
  
- 3) Pandangan sosiologis-antropologis atau sosio-antropologis adalah cara melihat pendidikan dasar dari fungsi proses pendidikan dasar dalam ...
  - A. proses sosialisasi atau pendewasaan peserta didik dalam konteks kehidupan bermasyarakat,
  - B. sosialisasi atau pendewasaan peserta didik dalam konteks kehidupan bermasyarakat, dan proses enkulturasi atau pewarisan nilai dari generasi tua kepada peserta didik yang sedang mendewasa dalam konteks kebudayaan.
  - C. proses enkulturasi atau pewarisan nilai dari generasi tua kepada peserta didik yang sedang mendewasa dalam konteks kebudayaan.
  - D. sosialisasi atau pendewasaan peserta didik dalam komunitas lokal dan proses enkulturasi atau pewarisan nilai dari orang tua kepada anaknya di lingkungan keluarga inti..

- 4) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) merupakan salah satu bentuk pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, dalam jalur pendidikan formal di Indonesia pada saat ini. Bentuk pendidikan ini secara operasional dilaksanakan sebagai ....
- situs pendidikan masing-masing sekolah
  - organisasi pendidikan masing-masing sekolah
  - satuan pendidikan masing-masing sekolah
  - bentuk pendidikan masing-masing sekolah
- 5) Ada beberapa argumen tentang keniscayaan pendidikan untuk usia SD, antara lain yang menekankan pada konsep pendidikan yang sistemik adalah ....
- pelembagaan proses pendidikan untuk usia dalam sistem pendidikan persekolahan atau *schooling system*, diyakini sangat strategis, artinya sangat tepat dilakukan, untuk mempengaruhi, mengondisikan, dan mengarahkan perkembangan mental, fisik, dan sosial anak dalam mencapai kedewasaannya
  - proses pendewasaan melalui sekolah diyakini lebih mudah dan massal artinya lebih memberikan hasil yang baik tanpa biaya besar daripada proses pendewasaan yang dilepas secara alami dan kontekstual melalui proses sosialisasi atau pergaulan dalam keluarga yang tanpa memerlukan biaya tetapi sukar dikaji hasilnya
  - berbagai teori psikologi khususnya teori belajar yang menjadi landasan konseptual teori pembelajaran, seperti teori behaviorisme, kognitifisme, humanisme, dan sosial sesungguhnya lebih mendukung pendidikan melalui alam
  - berbagai teori psikologi khususnya teori belajar yang menjadi landasan konseptual teori pembelajaran, seperti teori behaviorisme, kognitifisme, humanisme; dan sosial cukup memberi landasan namun sukar diterapkan dalam prakteknya.
- 6) Filsafat pendidikan seperti perenialisme, yang menekankan pentingnya pewarisan kebudayaan, esensialisme, yang menekankan pada transformasi nilai esensial, progresifisme, yang menekankan pada pengembangan potensi individu, dan rekonstruksionalisme sosial, yang menekankan pengembangan individu untuk perubahan masyarakat dapat dinilai ....
- sangat mendukung proses pendewasaan anak melalui pendidikan persekolahan namun terkesan sangat utopia
  - mengesampingkan teori *socio-historical* dan teori *experiential learning* yang menekankan pada proses belajar melalui interaksi sosial-kultural dan belajar melalui pengalaman.

- C. bertolak belakang dengan teori *socio-historical* dan teori *experiential learning* yang menekankan pada proses belajar melalui interaksi sosial-kultural dan belajar melalui pengalaman.
  - D. saling melengkapi dengan teori *socio-historical* dan teori *experiential learning* yang menekankan pada proses belajar melalui interaksi sosial-kultural dan belajar melalui pengalaman.
- 7) Piaget menegaskan bahwa pengetahuan bukanlah duplikat dari objek, dan bukan pula sebagai tampilan kesadaran dari bentuk yang ada dengan sendirinya dalam diri individu. Pengetahuan sesungguhnya merupakan konstruksi pikiran yang terbentuk, karena secara ....
- A. genetik adanya interaksi antara organisme dengan lingkungan, dan secara fisik adanya interaksi antara pancaindera dengan objek
  - B. historis adanya pengalaman lampau sebagai organisme dalam lingkungan, dan secara sosial adanya interaksi antara individu
  - C. spiritual adanya interaksi antara organisme dengan pencipta dan secara kultural adanya interaksi antar budaya
  - D. biologis adanya interaksi antara organisme dengan lingkungan, dan secara kognitif adanya interaksi antara pikiran dengan objek
- 8) Anak usia SD/MI berada dalam tahap perkembangan kognitif Praoperasional sampai Konkrit. Pada usia ini anak memerlukan ....
- A. lingkungan belajar guna membangun pengetahuannya
  - B. bimbingan sistematis dan sistemik guna membangun pengetahuannya
  - C. sarana dan prasarana fisik guna membangun pengetahuannya
  - D. bimbingan seperlunya guna membangun pengetahuannya
- 9) Secara sosial-kultural aktivitas mental merupakan sesuatu hal yang unik hanya pada manusia. Hal itu merupakan produk dari belajar sosial atau *social learning*, yakni proses penyadaran simbol-simbol sosial dan internalisasi kebudayaan dan hubungan sosial. Kebudayaan diinternalisasi dalam bentuk sistem neuropsikis yang merupakan bagian dari bentuk aktivitas fisiologis dari otak manusia. Aktivitas mental yang tinggi memungkinkan pembentukan dan perkembangan proses mental manusia yang lebih tinggi. Dengan menggunakan teori sosial kultural, proses pendidikan di SD/MI seyogianya ....
- A. ditekankan sebagai proses pertumbuhan kemampuan dalam diri individu sebagai produk interaksi antara kemampuan intramental dan intermental individu dalam konteks sosial-kultural

- B. diperlakukan sebagai proses pertumbuhan kemampuan dalam diri individu sebagai produk interaksi antara kemampuan intramental dan intermental individu dalam konteks sosial-kultural
  - C. dinilai sebagai proses pertumbuhan kemampuan dalam diri individu sebagai produk interaksi antara kemampuan intramental dan intermental individu dalam konteks sosial-kultural
  - D. dirancang sebagai proses pertumbuhan kemampuan dalam diri individu sebagai produk interaksi antara kemampuan intramental dan intermental individu dalam konteks sosial-kultural
- 10) Dilihat secara sosiologis dan antropologis masyarakat dan bangsa Indonesia sangatlah heterogen dalam segala aspeknya. Oleh karena itu, instrumentasi atau pengelolaan sistem pendidikan itu tidaklah mungkin dilakukan secara homogen penuh. Untuk itulah dalam sistem pendidikan kita saat ini perlu diupayakan berbagai ....
- A. perangkat kurikulum nasional yang bersifat sentralistik untuk tingkat satuan pendidikan dalam rangka penerapan kurikulum yang berdiversifikasi untuk melayani keberagaman secara nasional.
  - B. kebijakan teknis tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersifat desentralistik; penerapan kurikulum yang berdiversifikasi untuk melayani keberagaman; dan pengembangan standar nasional pendidikan sebagai baku mutu yang sepenuhnya dikendalikan secara nasional.
  - C. pembaharuan seperti kurikulum nasional yang bersifat sentralistik menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersifat desentralistik; penerapan kurikulum yang berdiversifikasi untuk melayani keberagaman; dan pengembangan standar nasional pendidikan sebagai baku mutu pendidikan secara nasional.
  - D. daya dukung kurikulum nasional yang bersifat sentralistik untuk tingkat satuan pendidikan dalam penerapan kurikulum yang berdiversifikasi untuk melayani keberagaman; dengan dukungan pembiayaan yang sentralistik.

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
80 - 89% = baik  
70 - 79% = cukup  
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

## KEGIATAN BELAJAR 2

## Landasan Historis, Ideologis, dan Yuridis Pendidikan Sekolah Dasar

### A. LANDASAN HISTORIS, DAN IDEOLOGIS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)

Landasan historis dan ideologis adalah dasar pemikiran yang diangkat dari fakta sejarah yang relevan tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Sekolah Dasar beserta ide-ide atau pertimbangan yang melatarbelakanginya. Sejak pada masa Hindia Belanda sampai saat ini. Tentu saja dalam modul ini tidak akan dibahas sejarah pendidikan SD secara rinci, melainkan hanya kita ambil tonggak-tonggak sejarahnya yang memberi makna pada kita. Pembahasan rinci tentang hal itu, dapat Anda jumpai dalam buku-buku tentang Sejarah Pendidikan di Indonesia.

Secara historis atau kesejarahan, pendidikan Sekolah Dasar di Indonesia merupakan kelanjutan dari sistem pendidikan pada masa Hindia Belanda yang memang dibangun lebih banyak untuk kepentingan penjajahan Belanda di Indonesia. Pada dasarnya sistem pendidikan pada masa itu ditekankan pada upaya memperoleh tenaga terampil yang mengerti nilai budaya penjajah sehingga menguntungkan mereka dalam mempertahankan dan melangsungkan penjajahannya. Dalam konteks itu orang Indonesia, yang disebut juga bumi putra, diperlakukan sebagai hamba atau *onderdaan*. Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan pergaulan dunia sistem pendidikan Hindia Belanda pun pada jamannya itu terus mengalami perubahan yang dinamis. Seperti diungkapkan oleh Djojonegoro (1996: 2) sebagai berikut.

Sistem pendidikan Indonesia dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa berkembang secara dinamis pada lingkungan masyarakat yang juga berkembang dalam dimensi ideologi, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Dalam perkembangannya dari waktu ke waktu, pendidikan di bumi nusantara secara konsisten dianggap berfungsi sebagai wahana transformasi, transmisi, dan sosialisasi nilai-nilai, tradisi, ilmu pengetahuan, serta teknologi dan seni dari masyarakatnya, yang berlangsung baik melalui jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah.

Pendidikan Sekolah Dasar merupakan bagian dari jalur pendidikan sekolah. Merujuk pada paparan Djojonegoro (1996: 12-28), perkembangan pendidikan sekolah pada jaman penjajahan Belanda secara singkat dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Sekolah Dasar pertama kali didirikan pada zaman VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) pada tahun 1617 yang menjelma menjadi Sekolah Batavia (*Bataviasche School*) pada tahun 1622 dan ditutup tahun 1632. Sejenis Sekolah Dasar itu pada tahun 1630 didirikan oleh masyarakat Sekolah Warga masyarakat (*Burger School*) untuk tujuan pendidikan budi pekerti.
2. Pada akhir abad ke 18 dan awal abad ke 19 Pemerintah Hindia Belanda mulai menangani pendidikan untuk Bumi Putra dengan tujuan untuk memperoleh tenaga terampil untuk kepentingan penjajahan dengan model dualistik. Untuk golongan penduduk Eropa dan Bumi Putra didirikan dua sekolah yang berbeda.

Untuk Bumi Putra didirikan dua jenis Sekolah Dasar, yakni Sekolah Dasar Kelas Pertama (*de scholen der eerste klasse*), yang kemudian berkembang menjadi HIS (*Hollandsch Inlandsche School*) yang diperuntukkan bagi anak tokoh pribumi, bangsawan, atau orang kaya; dan Sekolah Dasar Kelas Dua (*de schoolen der tweede klasse*) yang diperuntukkan bagi pribumi pada umumnya. Di sini sudah mulai dilakukan **segregasi sosial** bagi Bumi Putra.

3. Pada abad ke 20, sejalan dengan terjadinya perubahan yang terjadi di seluruh dunia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya mendesak pemerintah Hindia Belanda untuk melakukan perubahan dalam melaksanakan sistem pendidikannya, dengan landasan Politik Etis (*Etische Politiek*). Pendidikan Sekolah Dasar tetap bersifat dualistik. Ada dua jenis Sekolah Dasar yakni: (1) Sekolah Dasar berbahasa Belanda untuk anak keturunan Eropa dan timur asing, serta pribumi terkemuka/kaya yang disebut dengan Sekolah rendah Eropa (*Europesche Lager School atau ELS*); dan (2) Sekolah Dasar berbahasa daerah untuk keturunan pribumi pada umumnya yang disebut Sekolah Rendah Bumi Putera (*Inlandsche School*) dan Sekolah Bumi Putera – Belanda (*Hollandsch Inlandsche School atau HIS*) untuk pribumi terkemuka/bangsawan. Khusus Sekolah Bumi Putera terbagi dua yakni Sekolah Bumi Putera Kelas Dua dengan masa belajar lima tahun (*Inlandsche School*) dan Sekolah Desa (*Volks School*) dengan masa belajar tiga

tahun, sebagai sekolah Bumi Putera kelas pertama. Selain itu ada *Sekolah Peralihan* dari *Volks School* ke Sekolah Dasar berbahasa Belanda yang dikenal *Schakelshool* dengan lama belajar lima tahun, sama dengan HIS, yang diperuntukkan bagi Bumi Putera.

4. Pada masa perjuangan kemerdekaan, yakni antara tahun 1908 Kebangkitan Nasional dan masa Pendudukan Jepang sampai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 berkembang berbagai gerakan pendidikan yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat yang sudah tercerahkan sebagai komponen bangsa yang sadar akan pentingnya pembangunan bangsa. Gerakan pendidikan yang di dalamnya tercakup pendidikan setingkat Sekolah Dasar dilakukan oleh Perguruan Taman Siswa dengan Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh utamanya; Perguruan Muhammadiyah dengan Kyai Haji Achmad Dahlan sebagai tokoh sentranya, dan Pendidikan Maarif dengan Kyai Haji Masmansur sebagai salah seorang tokohnya. Sekolah Dasar dalam konteks Perguruan Taman Siswa disebut Taman Muda dengan masa belajar empat tahun, Dalam konteks Perguruan Muhammadiyah Sekolah Dasar disebut *Volksschool* dengan masa belajar tiga tahun, *Sultaanatschool*, juga tiga tahun yang dikelola oleh Kesultanan, *Vervolgsschool* dengan masa belajar dua tahun serta HIS Muhammadiyah dengan masa belajar empat tahun. Dalam konteks pendidikan Maarif pendidikan setingkat Sekolah Dasar disebut Madrasah, yang sampai saat ini kita kenal adanya Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan masa belajar bervariasi dan belum memasukan pendidikan umum tetapi dominan pendidikan agama. Berbagai organisasi Islam lainnya di seluruh Indonesia melakukan kiprah pendidikan serupa dengan ketiga organisasi kemasyarakatan tersebut.

Dari fakta sejarah pendidikan Sekolah Dasar pada zaman Hindia Belanda, kita dapat menangkap makna bahwa **segregasi sosial dan diskriminasi secara sengaja dilakukan terhadap anak penduduk Bumi Putera** dalam memperoleh kesempatan belajar di Sekolah Dasar, tergantung pada latar belakang sosial, ekonomi dan budaya. Ideologi ini ternyata masih kita jumpai dalam instrumentasi dan praksis sistem pendidikan nasional setelah Indonesia merdeka. Hal lain yang sangat penting adalah dengan tumbuhnya berbagai gerakan pendidikan pada masa perjuangan kemerdekaan, yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa, tumbuh dan berkembang pula konsep dan dasar ideologi pendidikan yang walaupun

berbeda dalam nomenklaturanya dan konteks perwujudannya, tetapi kesemuanya mengarah pada satu tujuan adanya sistem pendidikan yang inheren dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia, contohnya filsafat dan ideologi pendidikan Taman Siswa *Ing madya mangun karsa, Ing Ngarsa sung Tulada, Tut Wuri Handayani*.

## **B. LANDASAN HISTORIS-IDEOLOGIS DAN YURIDIS PENDIDIKAN SD**

Landasan historis-ideologis dan yuridis pendidikan Sekolah Dasar pada bagian ini akan kita bahas dari sudut pandang pemikiran tentang sistem pendidikan nasional sejak Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan sekarang. Dengan demikian kita akan memahami secara utuh perkembangan Sekolah Dasar di zaman kemerdekaan, zaman kita hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu kita akan membahas hal itu sekaligus dari sisi **sejarahnya** sejak tahun 1945, **ideologi** pendidikan yang dikembangkan, serta berbagai ketentuan perundang-undangan tentang semua itu sebagai **landasan yuridis formal** pendidikan nasional. **Landasan ideologis dan yuridis** pendidikan pada dasarnya merupakan komitmen politik Negara Republik Indonesia yang diwujudkan dalam berbagai ketentuan normatif konstitusional yang mencerminkan **bagaimana sistem pendidikan nasional dibangun dan diselenggarakan untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional**.

Ketika bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan ditetapkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 dan terpilihnya Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pertama, maka secara yuridis seluruh pengaturan tentang sistem pendidikan nasional berada di bawah kekuasaan Pemerintah RI. Karena kehidupan **bermasyarakat dan berbangsa Indonesia** sebelum merdeka berlanjut menjadi kehidupan **bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia**, maka apa yang telah dirintis dan dikembangkan dalam rangka pendidikan Hindia Belanda dan Jepang sebelum kemerdekaan itu menjadi modal dasar bagi sistem pendidikan nasional Indonesia, termasuk di dalamnya sistem pendidikan yang berkenaan dengan pendidikan Sekolah Dasar.

Dalam kurun waktu tahun 1945 sampai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Sisdiknas), telah berlaku tiga Undang-Undang yang mengatur Sistem Pendidikan Nasional, yakni UU RI Nomor 4 Tahun 1950, UU RI No. 22 Tahun 1961, dan UU RI No. 2 Tahun 1989. Tahun 1945-1950, pendidikan Sekolah Dasar termasuk jenjang Pendidikan Rendah dengan sebutan Sekolah Rakyat (SR) dengan masa belajar enam tahun. Dalam UU RI No. 4 Tahun 1950 dan UU RI No. 22 Tahun 1961 pendidikan Sekolah Dasar termasuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar yang mencakup Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan lama belajar masing-masing 6 tahun. Sementara itu menurut UU RI No. 2 Tahun 1989 pendidikan Sekolah Dasar termasuk jenjang Pendidikan Dasar yang mencakup SD dan MI serta Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Saat ini pendidikan Sekolah Dasar diselenggarakan atas dasar UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Dalam konsideran Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional digariskan bahwa: (1) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang; (3) sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;

Oleh karena itu, secara ideologis dan yuridis ditetapkan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar atau fondasi pendidikan nasional. (Pasal 2 UU 20 Tahun 2003). Hal ini mengandung makna bahwa pendidikan nasional, termasuk di dalamnya pendidikan di SD/MI harus sepenuhnya didasarkan pada cita-cita, nilai, konsep dan moral yang terkandung dalam bagian dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yakni **mencerdaskan kehidupan**

**bangsa** yang berdasarkan kepada **Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.** Oleh karena itu, pendidikan di SD/MI bukanlah pendidikan sekuler tetapi pendidikan yang berjiwa Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Pendidikan Agama Akhlak Mulia sebagai salah satu Mata Pelajaran wajib dalam Kurikulum pendidikan dasar dan menengah (UU 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, Pasal 27 beserta Penjelasannya, dan PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang SNP dalam Pasal 6).

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pendidikan SD/MI wajib mewujudkan fungsi pendidikan nasional yang mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan yang menjadi tujuan pendidikan SD/MI merupakan bagian yang inheren dari tujuan pendidikan nasional **dalam konteks anak usia SD/MI**, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (Pasal 2 UU 20 Tahun 2003). Hal ini mengandung makna bahwa pendidikan SD/MI merupakan **lingkungan pendidikan formal terdini** untuk menapaki perjalanan mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut. Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa pendidikan harus dimaknai sebagai "... usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara." (Pasal 1 huruf 1 UU 20 Tahun 2003).

Pendidikan dasar, atau dalam wacana akademis dikenal dengan *basic education*, merupakan bagian dari struktur pendidikan formal yang paling rendah, yang dalam Pasal 17 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dinyatakan bahwa *Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah* (ayat 1). Satuan pendidikan pada jenjang ini dapat berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP)

dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat (ayat 2). Yang dimaksud dengan *...yang sederajat dengan SD/MI adalah program seperti Paket A dan yang sederajat dengan SMP/MTs adalah program seperti Paket B*. Secara lebih spesifik penjabaran tujuan pendidikan pada SD/MI, dalam Pasal 11 RPP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Versi 21 Februari 2007) dikemukakan sebagai berikut.

1. Pendidikan dasar berfungsi menanamkan nilai-nilai, sikap, dan rasa keindahan, serta memberikan dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung serta kapasitas belajar peserta didik untuk melanjutkan ke pendidikan menengah dan/atau untuk hidup di masyarakat, sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.
2. Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Dengan demikian maka pendidikan SD mengemban dua fungsi, yakni fungsi pengembangan potensi peserta didik secara psikologis dan pemberian landasan yang kuat untuk pendidikan SMP dan seterusnya. Sedangkan tujuannya secara substantif merujuk pada tujuan pendidikan nasional.

Sesuai dengan prinsip pendidikan yang terbuka, multimakna, demokratis dan tidak diskriminatif, pendidikan SD ini juga menerapkan prinsip perpindahan peserta didik antar satuan pendidikan SD dan antar jalur pendidikan SD dengan jalur pendidikan nonformal dan informal. Mengenai hal itu diatur dalam Pasal 15 (RPP Wajar) sebagai berikut.

1. Peserta didik pada SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat berhak pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang setara.
2. Peserta didik yang belajar secara mandiri berhak pindah ke SD, MI, SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat setelah melalui tes penempatan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
3. Peserta didik yang belajar di negara lain pada jenjang pendidikan dasar berhak pindah ke SD, MI, SMP, atau MTs, atau bentuk lain yang sederajat.

Pengaturan tersebut memungkinkan peserta didik pada pendidikan nonformal Paket A, misalnya pindah ke SD atau peserta didik yang mengikuti pendidikan informal di rumah sebagai bentuk *Home Schooling* pindah ke SD. Tentu saja perpindahan itu harus diatur mekanismenya.

Sementara itu dalam Pasal 16 diatur pula tentang kewajiban peserta didik (RPP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan) yang pada intinya dinyatakan bahwa, peserta didik SD/MI berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan dengan cara sebagai berikut.

1. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya;
2. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
3. mengikuti proses pembelajaran dengan menjunjung tinggi kejujuran akademik dan mematuhi semua peraturan yang berlaku;
4. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial di antara teman;
5. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi sesama;
6. mencintai lingkungan, bangsa dan negara; dan
7. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan sekolah.

Semua kewajiban sebagaimana dimaksud di atas seyogianya dilakukan dengan bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan, serta melalui pembiasaan peserta didik. Hal ini mengandung makna bahwa para pendidik dan tenaga kependidikan harus menjadi teladan bagi para peserta didik dalam menjalankan norma sosial yang menjadi kewajiban peserta didik tersebut.

Untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan pendidikan SD diperlukan pengaturan tentang pendirian satuan pendidikan SD. Untuk itu dalam hal pendirian satuan pendidikan SD/MI dalam Pasal 17 RPP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan diatur sebagai berikut.

1. SD, MI, SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat dapat didirikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau masyarakat.
2. Pendirian SD, MI, SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat wajib memperoleh izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Syarat-syarat untuk memperoleh izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. isi pendidikan/kurikulum;
  - b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;

- c. sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran;
  - d. sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan sekurang-kurangnya untuk satu tahun akademik berikutnya;
  - e. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
  - f. manajemen dan proses pendidikan.
4. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b, c, d, dan e berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
  5. Syarat manajemen dan proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f mencakup:
    - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
    - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
    - c. perimbangan antara jumlah satuan pendidikan dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
    - d. jarak satuan pendidikan yang diusulkan di tengah kluster satuan pendidikan sejenis; dan
    - e. kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan sekolah/madrasah yang ada.

Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas juga diatur tentang hakikat dan kedudukan program Wajib Belajar pendidikan dasar yang mencakup pendidikan SD/MI dan SMP/MTs. Dalam RPP Wajib Belajar (Wajar) (Versi Final Setneg) diatur hal-hal sebagai berikut.

1. Wajib belajar diselenggarakan pada SD, MI, SDLB, Paket A; SMP, MTs, SMPLB, dan Paket B, dan bentuk lain yang sederajat.
2. Satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar wajib menerima peserta didik dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai kemampuan satuan pendidikan yang bersangkutan.
3. Satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan program wajib belajar yang bermutu.
4. Pendanaan biaya operasi satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar ditanggung oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

Sementara itu dalam Pasal 19 RPP Wajar tersebut diatur tentang peserta didik dalam program Wajar sebagai berikut.

1. Setiap warga negara berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
2. Setiap warga negara berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti program wajib belajar pada pendidikan dasar.
3. Peserta didik program wajib belajar yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun yang belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus di luar tanggungan Pemerintah Daerah .

Hal itu mengandung arti bahwa masukan pendidikan SD dalam konteks wajib belajar adalah warga negara usia sekurang-kurangnya 6 tahun. Sedangkan dalam Pasal 20 RPP Wajar tersebut diatur tentang kewajiban orang tua dan Pemerintah/pemerintah daerah dalam program Wajar sebagai berikut.

1. Orang tua/wali yang memiliki anak berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun wajib menyekolahkan anaknya pada satuan pendidikan dasar yang dipilihnya.
2. Pemerintah Daerah dapat menetapkan wajib belajar bagi anak berusia lebih dari 15 (lima belas) tahun pada pendidikan di atas pendidikan dasar.

Mengenai peran Pemerintah/pemerintah daerah dalam program Wajar diatur dalam Pasal 21 berikut ini.

1. Pemerintah menetapkan kebijakan nasional dalam mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi serta menentukan pentahapan penuntasan wajib belajar, yang dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan, Rencana Strategis Bidang Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
2. Pemerintah Daerah berkewajiban merencanakan pentahapan penuntasan wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah masing-masing sesuai dengan kondisi dan potensi daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
3. Pentahapan penuntasan wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan, Rencana Strategis Bidang Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

4. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan program wajib belajar.
5. Pemerintah melakukan evaluasi penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar.
6. Pemerintah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bila seluruh ketentuan di atas dapat dilaksanakan dengan baik, maka program Wajar tersebut akan memberi dampak yang luas bagi pencerdasan kehidupan bangsa secara bertahap. Oleh karena itu, sinergi seluruh unsur pemerintahan pusat dan daerah sangatlah penting. Sedangkan tentang peranan masyarakat dalam program Wajar diatur dalam Pasal 22 RPP Wajar tersebut, sebagai berikut.

1. Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar.
2. Masyarakat berhak:
  - a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program wajib belajar;
  - b. mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar.

Sebagaimana diatur dalam pasal 24 program Wajar dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah/Pemerintah Daerah. Secara tegas dalam Pasal itu dinyatakan sebagai berikut.

1. Program wajib belajar diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah dan pemerintah daerah.
2. Ketuntasan wajib belajar diukur berdasarkan kriteria yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pentahapan pelaksanaan program Wajar memang sangat perlu mengingat kemampuan fiskal pemerintah masih belum mampu memenuhi tuntutan konstitusional biaya pendidikan sebesar 20 % dari APBN dan APBD. Dalam hal pengelolaan program Wajar diatur dalam Pasal 24 sebagai berikut.

1. Pengelolaan wajib belajar tingkat nasional menjadi tanggung jawab Menteri.
2. Pengelolaan wajib belajar pendidikan dasar pada MI, MTs, dan pendidikan keagamaan menjadi tanggung jawab Menteri Agama setelah mendengar pertimbangan Menteri.
3. Pengelolaan wajib belajar pendidikan dasar tingkat provinsi menjadi tanggung jawab gubernur.
4. Pengelolaan wajib belajar pendidikan dasar tingkat kabupaten/kota menjadi tanggung jawab bupati/walikota.
5. Pengelolaan wajib belajar pendidikan dasar di luar negeri menjadi tanggung jawab Kepala Perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Pasal 25 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan program wajib belajar, termasuk sanksi pelanggaran terhadap Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan kondisi daerah masing-masing melalui peraturan daerah.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

Sebagai **Latihan** cobalah Anda tuliskan persoalan apa saja yang Anda alami dalam menyelenggarakan pendidikan di SD masing-masing dalam kaitannya dengan ketentuan perundangan yang ada. Misalnya, seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan SD tempat Anda bertugas, melalui Komite Sekolah sebagai perwujudan manajemen berbasis sekolah. Kemukakan pula cara yang telah Anda lakukan untuk mengatasinya secara bersama-sama.



## RANGKUMAN

---

1. Landasan historis dan ideologis adalah dasar pemikiran yang diangkat dari fakta sejarah yang relevan tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Sekolah Dasar beserta ide-ide atau

- pertimbangan yang melatarbelakanginya. sejak pada masa Hindia Belanda sampai saat ini.
2. Secara historis atau kesejarahan, pendidikan Sekolah Dasar di Indonesia merupakan kelanjutan dari sistem pendidikan pada masa Hindia Belanda yang memang dibangun lebih banyak untuk kepentingan penjajahan Belanda di Indonesia. Pada dasarnya sistem pendidikan pada masa itu ditekankan pada upaya memperoleh tenaga terampil yang mengerti nilai budaya penjajah sehingga menguntungkan mereka dalam mempertahankan dan melangsungkan penjajahannya. Dalam konteks itu orang Indonesia, yang disebut juga Bumi Putera, diperlakukan sebagai hamba atau onderdaan.
  3. Sistem pendidikan Indonesia dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa berkembang secara dinamis pada lingkungan masyarakat yang juga berkembang dalam dimensi ideologi, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Dalam perkembangannya dari waktu ke waktu, pendidikan di bumi Nusantara secara konsisten dianggap berfungsi sebagai wahana transformasi, transmisi, dan sosialisasi nilai-nilai, tradisi, ilmu pengetahuan, serta teknologi dan seni dari masyarakatnya, yang berlangsung baik melalui jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah.
  4. Dari fakta sejarah pendidikan Sekolah Dasar pada zaman Hindia Belanda, kita dapat menangkap makna bahwa segregasi sosial dan diskriminasi secara sengaja dilakukan terhadap anak penduduk bumi putera dalam memperoleh kesempatan belajar di Sekolah Dasar, tergantung pada latar belakang sosial, ekonomi dan budaya. Ideologi ini ternyata masih kita jumpai dalam instrumentasi dan praksis sistem pendidikan nasional setelah Indonesia merdeka.
  5. Hal lain yang sangat penting adalah tumbuhnya berbagai gerakan pendidikan pada masa perjuangan kemerdekaan, yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa, telah mendorong tumbuh dan berkembang pula konsep dan dasar ideologi pendidikan yang walaupun berbeda dalam *nomenklatur*nya dan konteks perwujudannya, tetapi kesemuanya mengarah pada satu tujuan adanya sistem pendidikan yang inheren dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Salah satunya adalah filsafat dan ideologi pendidikan Taman Siswa *Ing madya mangun karsa, Ing Ngarsa sung Tulada, Tut Wuri Handayani*.
  6. Landasan ideologis dan yuridis pendidikan pada dasarnya merupakan komitmen politik Negara Republik Indonesia yang diwujudkan dalam berbagai ketentuan normatif konstitusional yang mencerminkan bagaimana sistem pendidikan nasional dibangun dan

diselenggarakan untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional.

7. Secara ideologis dan yuridis ditetapkan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar atau fondasi pendidikan nasional. Hal ini mengandung makna bahwa pendidikan nasional, termasuk di dalamnya pendidikan di SD/MI harus sepenuhnya didasarkan pada cita-cita, nilai, konsep dan moral yang terkandung dalam bagian dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
8. Secara ideologis dan yuridis Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar atau fondasi pendidikan nasional. Hal ini mengandung makna bahwa pendidikan nasional, termasuk di dalamnya pendidikan di SD/MI harus sepenuhnya didasarkan pada cita-cita, nilai, konsep dan moral yang terkandung dalam bagian dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
9. Pendidikan SD mengemban dua fungsi, yakni fungsi pengembangan potensi peserta didik secara psikologis dan pemberian landasan yang kuat untuk pendidikan SMP dan seterusnya. Sedangkan tujuannya secara substantif merujuk pada tujuan pendidikan nasional.
10. Peserta didik SD/MI berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan dengan cara sebagai berikut.
  - a. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya;
  - b. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
  - c. mengikuti proses pembelajaran dengan menjunjung tinggi kejujuran akademik dan mematuhi semua peraturan yang berlaku;
  - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial di antara teman;
  - e. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi sesama;
  - f. mencintai lingkungan, bangsa dan negara; dan

- g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan sekolah.
11. Bila seluruh ketentuan perundang-undangan tentang wajib belajar 9 tahun dapat dilaksanakan dengan baik, maka program Wajar tersebut akan memberi dampak yang luas bagi pencerdasan kehidupan bangsa secara bertahap. Oleh karena itu, sinergi seluruh unsur pemerintahan pusat dan daerah sangatlah penting.



## TES FORMATIF 2

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Landasan historis dan ideologis adalah dasar pemikiran yang diangkat dari fakta sejarah yang relevan tentang ....
  - A. pergulatan pemikiran tentang pendidikan Sekolah Dasar beserta tokoh-tokoh yang ada di belakangnya sejak pada masa Hindia Belanda sampai saat ini
  - B. dinamika pemikiran pendidikan Sekolah Dasar beserta ide-ide atau pertimbangan politik sejak pada masa Hindia Belanda sampai saat ini
  - C. pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Sekolah Dasar beserta ide-ide atau pertimbangan yang melatarbelakanginya sejak pada masa Hindia Belanda sampai saat ini
  - D. perkembangan pendidikan Sekolah Dasar beserta masalahnya sejak pada masa Hindia Belanda sampai saat ini
  
- 2) Secara historis atau kesejarahan, pendidikan Sekolah Dasar di Indonesia merupakan kelanjutan dari sistem pendidikan pada masa Hindia Belanda yang memang dibangun lebih banyak untuk kepentingan ....
  - A. memperoleh tenaga terampil yang mengerti nilai budaya penjajah sehingga menguntungkan mereka dalam mempertahankan dan melangsungkan penjajahannya
  - B. pengentasan penduduk bumi putra yang secara riil diperlakukan sebagai hamba atau onderdaan
  - C. pengentasan penduduk bumi putra dan golongan timur asing secara riil sesuai dengan kebutuhan penjajah
  - D. pengentasan bumi putera yang sebagai bentuk balas budi yang tulus penjajah

- 3) Sistem pendidikan Indonesia dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa berkembang secara dinamis pada lingkungan masyarakat yang juga berkembang dalam dimensi ideologi, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Dalam perkembangannya dari waktu ke waktu, pendidikan di bumi Nusantara secara konsisten dianggap berfungsi sebagai wahana transformasi, transmisi, dan sosialisasi nilai-nilai ....
- A. tradisional dan keagamaan dari masyarakatnya, yang berlangsung baik melalui jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah
  - B. baru yang menyertai perkembangan teknologi dan seni dari masyarakatnya, yang berlangsung baik melalui jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah
  - C. kejuangan dan cinta tanah air dari masyarakatnya, yang berlangsung baik melalui jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah
  - D. tradisi, ilmu pengetahuan, serta teknologi dan seni dari masyarakatnya, yang berlangsung baik melalui jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah
- 4) Dari fakta sejarah pendidikan Sekolah Dasar pada zaman Hindia Belanda, kita dapat menangkap makna bahwa segregasi sosial dan diskriminasi secara sengaja dilakukan terhadap anak penduduk bumi putera dalam memperoleh kesempatan belajar di Sekolah Dasar, yang didasarkan pada latar belakang sosial, ekonomi dan budaya. Ideologi ini ternyata ....
- A. sudah tidak dijumpai dalam instrumentasi dan praksis sistem pendidikan nasional setelah Indonesia merdeka
  - B. masih kita jumpai dalam instrumentasi dan praksis sistem pendidikan nasional setelah Indonesia merdeka
  - C. dalam banyak hal masih kita jumpai dalam instrumentasi dan praksis sistem pendidikan nasional setelah Indonesia merdeka
  - D. dijumpai semakin kuat dalam instrumentasi dan praksis sistem pendidikan nasional setelah Indonesia merdeka
- 5) Tumbuhnya berbagai gerakan pendidikan pada masa perjuangan kemerdekaan, yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa, telah mendorong tumbuh dan berkembang dasar ideologi pendidikan yang salah satunya adalah *Ing madya mangun karsa, Ing Ngarsa sung Tulada, Tut Wuri Handayani*. Ideologi ini pada dasarnya mengandung makna pendidikan yang ....
- A. bersifat liberal ala pendidikan Barat
  - B. bernuansa religius berlandaskan agama tertentu

- C. bersifat demokratis dan penuh tenggang rasa
  - D. berwawasan kultural yang mengetengahkan pemberdayaan
- 6) Landasan ideologis dan yuridis pendidikan pada dasarnya merupakan komitmen politik Negara Republik Indonesia yang diwujudkan dalam ....
- A. berbagai program yang mencerminkan bagaimana sistem pendidikan nasional dibangun dan diselenggarakan untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional
  - B. berbagai ketentuan normatif konstitusional yang mencerminkan bagaimana sistem pendidikan nasional dibangun dan diselenggarakan untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional
  - C. berbagai kelembagaan yang mewadahi program pendidikan nasional untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional
  - D. berbagai perangkat pembelajaran yang mencerminkan bagaimana sistem pendidikan nasional dibangun dan diselenggarakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
- 7) Secara ideologis dan yuridis ditetapkan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar atau fondasi pendidikan nasional. Hal ini mengandung makna bahwa pendidikan nasional, termasuk di dalamnya pendidikan di SD/MI harus sepenuhnya didasarkan pada ....
- A. cita-cita, nilai, konsep dan moral yang terkandung dalam bagian dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945
  - B. nilai, konsep dan moral yang terkandung dalam bagian dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945
  - C. cita-cita, dan moral yang terkandung dalam bagian dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945
  - D. konsep dan moral yang terkandung dalam bagian dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945
- 8) Pendidikan SD mengemban dua fungsi, yakni pengembangan ....
- A. keterampilan peserta didik secara sosiologis dan pemberian landasan yang kuat untuk pendidikan dalam masyarakat
  - B. sikap peserta didik secara psikologis dan pemberian landasan yang kuat untuk pendidikan lebih lanjut
  - C. potensi peserta didik secara psikologis dan pemberian landasan yang kuat untuk pendidikan SMP dan seterusnya
  - D. peserta didik secara kultural dan pemberian landasan yang kuat untuk pendidikan seumur hidup

- 9) Peserta didik SD/MI berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan antara dengan cara sebagai berikut, kecuali .....
- menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya
  - menghormati pendidik dan tenaga kependidikan
  - menuntut haknya sebagai peserta didik semata
  - mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi sesama
- 10) Bila seluruh ketentuan perundang-undangan tentang wajib belajar 9 tahun dapat dilaksanakan dengan baik, maka program Wajar tersebut akan memberi dampak yang luas bagi pencerdasan kehidupan bangsa secara....
- cepat
  - pencerdasan kehidupan bangsa secara terus menerus
  - pencerdasan kehidupan bangsa secara bertahap.
  - pencerdasan kehidupan bangsa secara terbatas

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
 80 - 89% = baik  
 70 - 79% = cukup  
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

## Kunci Jawaban Tes Formatif

### *Tes Formatif 1*

- 1) A
- 2) D
- 3) B
- 4) C
- 5) A
- 6) D
- 7) D
- 8) B
- 9) B
- 10) C

### *Tes Formatif 2*

- 1) C
- 2) A
- 3) D
- 4) B
- 5) D
- 6) B
- 7) A
- 8) C
- 9) C
- 10) C

## Daftar Pustaka

- Bell-Gredler, M.E. (1986). *Learning and Instruction*, New York: Macmillan Publishing.
- Budiningsih, A (2003). *Teori Vygotsky dan Pendidikan*, Yogyakarta: Pustekkom dan UT.
- Brameld T (1965). *Education as Power*, New York: Macmillan Co.
- Djojonegoro, W. (1996). *Lima puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Depdiknas.
- Gagne, R.M., Briggs, L.J., & Wager, W.W. (1992). *Principles of Instructional Design (4<sup>th</sup> ed.)*. Orlando: Holt, Rinehart, and Winston.
- Moll, L.C. (1993). *Vygotsky and Education, Instructional Implications of Sociohistorical Psychology*, New York: Cambridge University Press.
- Republik Indonesia (2001). *Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta.
- Republik Indonesia (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Depdiknas.
- Republik Indonesia (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Depdiknas.
- Tilaar, H.A.R (2002). *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, Jakarta Grasindo.